



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 48-14-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN 2019 PROVINSI LAMPUNG**

**ACARA
MENDENGAR JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN PIHAK
TERKAIT, DAN KETERANGAN BAWASLU, SERTA
PENGESAHAN BUKTI TERMOHON, PIHAK TERKAIT, DAN
BAWASLU**

JAKARTA,

SELASA, 16 JULI 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 48-14-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

PERIHAL

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 Provinsi Lampung

PEMOHON

1. Partai Keadilan Sejahtera
(Perkara Nomor 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
2. Partai Demokrat
(Perkara Nomor 48-14-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
3. Partai Gerakan Indonesia
(Perkara Nomor 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)

ACARA

Mendengar Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu, serta Pengesahan Bukti Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu

Selasa, 16 Juli 2019, Pukul 10.30 – 11.39 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Aswanto | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

Fenny T. Purnamasari
Andriani W. Novitasari

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Sultan
2. Ampria Bukhori

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 48-14-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Yandri Sudarso
2. Agatha Lidyawati

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Nurhayati
2. Mirzalie

D. Termohon:

1. Handi Mulyaningsih
2. M. Tio Aliansyah

E. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Dan Nomor 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Berna Sudjana Ermaya
2. Fitri

F. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 48-14-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Taufik Hidayat
2. Muhammad Ulin Nuha

G. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Tanda Perdamaian Nasution

H. Bawaslu:

1. Fatikhatul Khoiriyah
2. Iskardo P. Panggar
3. Tamri Suhaimi
4. Moch. Afifuddin
5. Sulastio

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.30 WIB

1. KETUA: ASWANTO

Assalamualaikum wr. wb., selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, om swastiastu. Sidang dalam Perkara Nomor 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Keadilan Sejahtera, Perkara Nomor 48-14-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Demokrat, Perkara Nomor 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Gerakan Indonesia Raya dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum

KETUK PALU 3X

Untuk Perkara Nomor 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, silakan memperkenalkan diri!

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SULTAN

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.
Sebelumnya terima kasih kepada Majelis Hakim, Yang Mulia. Kami Kuasa Hukum Partai Keadilan Sejahtera ... Partai Keadilan Sejahtera untuk Perkara 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 pada agenda sidang hari ini datang 2 orang. Yang pertama saya sendiri, Sultan, yang kedua rekan saya, Ampria Bukhori. Terima kasih, assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: ASWANTO

Baik, berikutnya untuk Perkara Nomor 48-14-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019!

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48-14-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Assalamualaikum wr. wb. Kami Kuasa Hukum Partai Demokrat hadir 2 orang. Saya sendiri, Yandri Sudarso, teman saya (...)

5. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48-14-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AGATHA LIDYAWATI

Agatha Lidya.

6. KETUA: ASWANTO

Baik.

7. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48-14-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

8. KETUA: ASWANTO

Walaikumssalam wr. wb. Selanjutnya Perkara Nomor 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Gerakan Indonesia Raya!

9. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NURHAYATI

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.

Kami dari tim Kuasa Hukum Partai Gerindra untuk Perkara Nomor 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Saya, Nurhayati, didampingi oleh rekan saya, Mirzalie. Terima kasih, assalamualaikum wr. wb.

10. KETUA: ASWANTO

Walaikumssalam wr. wb. Selanjutnya untuk Pihak ... Pihak Termohon, KPU, siapa yang memperkenalkan diri dahulu?

11. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN NOMOR 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA

Siap, Majelis.

12. KETUA: ASWANTO

Oh ini, sudah Pak Berna dulu ya?

13. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN NOMOR 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA

Ya, Betul.

14. KETUA: ASWANTO

Pak Berna mulai hari pertama kita.

15. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN NOMOR 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA

Ya.

16. KETUA: ASWANTO

Hadir terus ini.

17. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN NOMOR 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA

Tugasnya di Panel sini, Pak.

18. KETUA: ASWANTO

Oh, ya. Artinya sudah hampir 40 perkara, ya?

19. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN NOMOR 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA

Ya, kurang lebih, kurang lebih begitu.

20. KETUA: ASWANTO

Silakan, Pak Berna!

21. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN NOMOR 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA

Terima kasih, Pak Majelis Hakim yang terhormat. Kami Termohon dalam perkara di Provinsi Lampung ini, kami Kantor Absar Kartabrata memegang Perkara Nomor 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

Pada saat ini komisioner Provinsi Lampung telah da ... telah ada di samping saya. Yang di sebelah kiri, Bapak M. Tio Aliansyah dan sebelah kanan saya, bu ... Ibu Hunel ... Handi, ya, Mulyaningsih ya, gitu. Saya

sendiri, Dr. Berna Sudjana Ermaya dan dampingi oleh rekan kami, Ibu Fitri. Selanjutnya dari Pak Demokrat, dari dari Partai Demokrat (...)

22. KETUA: ASWANTO

Ya, ini sudah merasa dirinya hakim karena mulai hari pertama, makanya dia mempersilakan. Silakan, silakan, Pak siapa, dari kantor hukum yang lain.

23. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 48-14-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAUFIK HIDAYAT

Terima kasih, Yang Mulia.

24. KETUA: ASWANTO

Ya.

25. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 48-14-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAUFIK HIDAYAT

Terima kasih, Pak Berna, terima kasih. Jadi (...)

26. KETUA: ASWANTO

Cuma diralat, tadi Pak Berna bukan 40, ternyata setelah kita hitung-hitung 80 lebih.

27. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 48-14-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAUFIK HIDAYAT

Baik, Yang Mulia. Baik (...)

28. KETUA: ASWANTO

Silakan!

29. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 48-14-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAUFIK HIDAYAT

Perkenalkan, kami dari Kantor Hukum Nurhadi Sigit Law Office, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KPU RI dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh Partai Demokrat, Yang Mulia.

Nama saya adalah Taufik Hidayat, di sini saya bersama rekan saya juga di belakang, Muhammad Ulin Nuha. Demikian, terima kasih, Yang Mulia.

30. KETUA: ASWANTO

Baik, selanjutnya Bawaslu. Pak Ustad, silakan!

31. BAWASLU: MOCH. AFIFUDDIN

Terima kasih, Yang mulia. Kami dari Bawaslu, saya Mochammad Afifuddin, anggota Bawaslu RI. Sebelah kanan saya, Ibu Fatikhatul Khoiriyah, ketua Bawaslu Lampung. Kemudian sebelah kiri Pak Iskardo P. Panggar, anggota Bawaslu Lampung. Di belakang ada Pak Tamri Suhaimi, anggota Bawaslu Lampung, dan juga Pak Sulastio tim ahli di Bawaslu RI. Terima kasih.

32. KETUA: ASWANTO

Baik, Pihak Terkait ini kelihatannya Pak Tanda sendiri ini. Terkait untuk nomor berapa, pak?

33. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TANDA PERDAMAIAN NASUTION

Terima kasih, Yang Mulia. Terkait untuk Perkara Nomor 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang diajukan oleh Partai Gerindra. Yang hadir saya sendiri, Tanda Perdamaian Nasution. Terima kasih, Yang Mulia.

34. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih. Sebelum kita mulai pemeriksaan lebih lanjut, sekali pun ini semua mulai dari hari pertama juga hadir semua, tapi perlu kami pertegas kembali bahwa baik Pihak Termohon, Terkait, dan Bawaslu yang disampaikan adalah untuk Termohon, perbaikan jawaban yang tidak lewat tenggat waktu. Demikian juga dengan Pihak Terkait yang keterangannya tidak lewat tenggat waktu.

Yang kedua. Bahwa Panel sudah mempelajari perbaikan Permohonan Saudara, keterangan-keterangan Saudara, dan bahkan Panel sudah membuat telaaahnya, sehingga pada kesempatan ini diminta untuk disampaikan bagian pokok-pokoknya saja dalam waktu yang tidak terlalu lama. Baik, kita mulai untuk Perkara Nomor 06-08-09/PHPU.DPR-

DPRD/XVII/2019 Partai Keadilan Sejahtera. Siapa yang akan menyampaikan?

35. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN NOMOR 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA

Terima kasih, Yang Mulia. Kami Termohon di Perkara Nomor 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai PKS yang dimohonkan oleh Partai PKS, dimana dalam eksepsi dianggap dibacakan dalam tenggang waktu, dianggap dibacakan. Dalam pokok perkara bahwa selain ... Termohon hanya untuk hanya untuk menjawab dalil-dalil Pemohon yang semata-mata diajukan terhadap dan atau berhubungan dengan Termohon.

Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh Termohon.

Provinsi Lampung. Untuk tabel 1 dan tabel 2 dianggap dibacakan, berkaitan dengan perolehan suara partai. Bahwa Termohon menyatakan tidak benar dalil yang diuraikan dalam tabel ... dalam tabel di atas. Fakta kejadian di TPS 2, fakta kejadian di TPS kelu ... 2 TPS Kelurahan Margorejo, Kecamatan Metro Selatan, pada hari Rabu tanggal 24 April 2019, pukul 16.25 WIB.

PPK Metro Selatan melakukan rekapitulasi terkait dengan perolehan suara untuk Kelurahan Margorejo. Setelah dibacakan form C-1 DPRD KP ... kabupaten/kota adalah ketidakcocokan antara jumlah perolehan suara partai dan suara calon dengan jumlah suara yang sah, vide Bukti 4, Kota Metro 4, PKS 06 dan seterusnya. Itu ditampilkan dalam sandingan data, dianggap tidak ... dianggap dibacakan.

36. KETUA: ASWANTO

Dibacakan, ya?

37. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN NOMOR 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA

Dan pada prinsipnya, secara umum ini sama.

38. KETUA: ASWANTO

Ya.

39. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN NOMOR 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA

Di poin 4, berdasarkan hasil rekomendasi panwas kecamatan tersebut, maka PPK melakukan perhitungan suara ulang, dengan disetujui oleh seluruh saksi. Khusus saksi PKS, mengajukan 2 permintaan, sebelum dilakukan perhitungan suara.

40. KETUA: ASWANTO

Ya.

41. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN NOMOR 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA

Yang pertama, perhitungan ulang harus dilakukan saat itu juga, tidak boleh ditunda. Yang kedua, harus dihadirkan petugas KPPS nya. Terhadap permintaan saksi dan ... dari PKS tersebut, langsung dipenuhi oleh PPK Metro Selatan dengan catatan apapun hasilnya, semua harus menerima dan saksi menyatakan siap menerima apapun hasilnya.

Bahwa dalam perhitungan suara ulang tersebut, didapati surat suara tidak sah sejumlah 7. Namun saat menghitung ulang, surat suara tidak sah didap ... didapati surat yang suaranya tercoblos di caleg PKB secara otomatis suara sah tersebut ditambahkan menjadi suara PKB. Sehingga, suara tidak sah berjumlah 6, vide Bukti T-003, Kota Metro 4, PKS.

Bahwa hasil dari perhitungan suara ulang, didapati hasil sebagai berikut, kami tidak ba ... dianggap dibacakan.

42. KETUA: ASWANTO

Ya, dianggap dibacakan.

43. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN NOMOR 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA

Bahwa pada saat pembukaan kotak suara dan ... dan penghitungan ulang surat suara tersebut, PPK melakukan sesuai dengan prosedur. Surat suara yang dipegang oleh PPK ditujukan kepada beberapa saksi partai politik untuk memastikan surat suara tersebut sah. Surat suara tersebut tidak dipegang oleh ... oleh orang yang tidak memiliki kewenangan, dan tidak dibawa ke area yang tidak steril.

Namun, saksi partai yang maju ke depan untuk melihat lebih dekat surat suara tersebut, vide Bukti T-008, Kota Metro 4, PKS, dan seterusnya.

44. KETUA: ASWANTO

Ya.

45. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN NOMOR 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA

Hasilnya tidak dibacakan.

46. KETUA: ASWANTO

Ya.

47. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN NOMOR 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA

Jadi, pada umumnya ini ham ... sama dari poin 10 sampai poin (...)

48. KETUA: ASWANTO

Baik. Ini kan 1 dapil saja, ya?

49. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN NOMOR 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA

Ya. Sampai poin 28 (...)

50. KETUA: ASWANTO

30?

51. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN NOMOR 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA

30.

52. KETUA: ASWANTO

Poin 30?

53. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN NOMOR 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA

Sampai habis, Pak.

54. KETUA: ASWANTO

Ya.

55. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN NOMOR 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA

Sampai poin 30,

56. KETUA: ASWANTO

Ya.

57. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN NOMOR 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA

Ini saya ... sama (...)

58. KETUA: ASWANTO

Ya.

59. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN NOMOR 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA

Intinya. Artinya, ini (...)

60. KETUA: ASWANTO

Polanya sama, ya?

61. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN NOMOR 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA

Polanya sama sehingga dianggap dibacakan.

62. KETUA: ASWANTO

Baik.

63. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN NOMOR 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA

Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Termohon sebagaimana terurai di atas, sekiranya memadai untuk menunjukkan bahwa Termohon dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukan untuk menjaga agar pemilihan umum calon anggota DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota secara serentak dapat diselenggarakan dengan benar dan berkualitas.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas merupakan fakta hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 987 dan seterusnya, yang secara ... tertanggal 21 Mei 2000 ... 2019 diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Petitum.

64. KETUA: ASWANTO

Ya.

65. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN NOMOR 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA

Dalam Eksepsi, mengabulkan Eksepsi Termohon. Dalam pokok perkara, menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 987 dan seterusnya. Menetapkan memper ... perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Lampung, Dapil IV, Kota Metro di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah perolehan suara Pemohon par ... Pemohon, partai politik anggota DPR RI di Provinsi Lampung. Perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Metro, Dapil IV, Parpol PKS, perolehan suaranya 5.138. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Terima kasih, Yang Mulia.

66. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih, Pak. Selanjutnya untuk Perkara Nomor 48-14-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Partai Demokrat?

67. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 48-14-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAUFIK HIDAYAT

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Kami langsung saja ke pokok perkara.

68. KETUA: ASWANTO

Ya, langsung ke pokok perkara.

69. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 48-14-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAUFIK HIDAYAT

Baik. Sebelumnya, Yang Mulia, ada renvoi, Yang Mulia (...)

70. KETUA: ASWANTO

Di halaman berapa itu?

71. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 48-14-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAUFIK HIDAYAT

Dengan tabel, Yang Mulia.

72. KETUA: ASWANTO

Yang ... yang mana? Yang tanggal 12 atau yang tanggal 8 ini?

73. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 48-14-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAUFIK HIDAYAT

Tanggal 12, Yang Mulia.

74. KETUA: ASWANTO

12, ya. Oke, halaman berapa renvoinya?

75. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 48-14-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAUFIK HIDAYAT

Untuk perolehan suara halaman 4, nomor 3. Perolehan suara (...)

76. KETUA: ASWANTO

Oke.

77. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 48-14-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAUFIK HIDAYAT

Atas nama Yandri Nazir, seharusnya itu adalah perolehan untuk Nomor Urut 5, Yang Mulia, Asep Makmur.

78. KETUA: ASWANTO

Jadi, Ir. H. Yandri Nazir diganti dengan?

79. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 48-14-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAUFIK HIDAYAT

Asep Makmur, Yang Mulia.

80. KETUA: ASWANTO

Asep Makmur, ya?

81. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 48-14-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAUFIK HIDAYAT

Betul.

82. KETUA: ASWANTO

Oke. Masih ada yang perlu direnvoi?

83. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 48-14-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAUFIK HIDAYAT

Cukup, Yang Mulia. Saya bacakan (...)

84. KETUA: ASWANTO

Cukup, ya? Ya, silakan!

85. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 48-14-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAUFIK HIDAYAT

Ya, baik. Persandingan perolehan suara calon anggota DPRD Provinsi menurut Termohon dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Lampung. Caleg Nomor Urut 1, Ir. Yandri Nazir, M.M., memperoleh suara menurut Termohon sebesar 16.431, sedangkan Asep Makmur, menurut Termohon mendapat suara sebesar 16.717 suara.

86. KETUA: ASWANTO

Ya.

87. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 48-14-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAUFIK HIDAYAT

Kemudian, kami membantah, tidak benar dalil Pemohon yang mendalilkan adanya kecurangan berupa penggelembungan suara oleh caleg nomen ... Nomor Urut 5 sebesar 695. Kemudian, data yang disandingkan oleh Pemohon di dalam Permohonannya sebagaimana tabel nomor 3, halaman 24 adalah data yang tidak benar Yang Mulia karena di dalam tabel tersebut, Termohon temukan adanya penambahan TPS yang dilakukan oleh Pemohon, yaitu penyebutan TPS 14, Desa Itik Rendai, Kecamatan Melinting, padahal di desa ... di Desa Itik Rendai tersebut, TPS nya hanya berjumlah 10 TPS. Namun, dalam Permohonan ini, oleh Pemohon ditambahkan sendiri menjadi 14 TPS. Sehingga untuk itu, mohon kepada Mahkamah untuk menolak tabel tersebut.

Bahwa Pemohon juga mendalilkan adanya rekomendasi dari Bawaslu. Memang demikian adanya, jadi adanya rekomendasi Bawaslu, merekemen ... merekomendasikan kepada KPU Provinsi Lampung untuk menindaklanjuti dengan melakukan pencermatan kembali dan apabila ditemukan kesalahan untuk dilakukan pembetulan atau perbaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, paling lambat hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2019. Itu adalah rekomendasi dan atas rekomendasi tersebut, kami sudah melaksanakannya.

Kemudian, hal-hal yang telah dikemukakan oleh Pemohon dalam Permohonannya, sebagaimana pada halaman 26 sampai halaman 7. Sebenarnya, Yang Mulia, itu sudah selesai ditunaikan oleh Termohon. Jadi, sebenarnya enggak ada masalah ... enggak ada masalah lagi, gitu loh.

Oke, dengan demikian untuk petitum, mohon terhadap keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987, bertanggal 21 Mei 2019, mohon untuk dikuatkan. Demikian, terima kasih, Yang Mulia.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN NOMOR 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA

Baik, Yang Mulia. Perkara Nomor 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Pemohon dari Partai Gerindra. Dalam ... dalam eksepsi, poin A.1,2,3, itu dianggap dibacakan sampai 7. Dalam tenggang waktu, poin 1, 2, dianggap dibacakan. Poin 3. Bahwa merupakan fakta hukum dalam Permohonan a quo, tertanggal 23 Mei 2019, pukul 23.08 WIB, nyata-nyata berkaitan dengan Provinsi Sumatera Utara, Dapil Sumatera Utara Permohonan 1, halaman 5. Sementara, dalam permohonan tertanggal 31 Mei 2019, pukul 15.25 WIB mengajukan tabel persandingan perolehan suara calon anggota DPR menurut Termohon dan Pemohon untuk pengisian DPRD Lampung Dapil II, vide Permohonan aquo halaman 5.

Bahwa dengan adanya perbaikan tertanggal 31 Mei 2019, pukul 15.25 WIB, harusnya dikualifikasikan sebagai pengajuan Permohonan baru karena terbukti telah berubah, baik yang berkaitan dengan daerah pemilihan Dapil, in casu Dapil Sumatra Utara dengan Lampung Dapil II maupun yang berkaitan dengan daerah pemilu.

Dalam pokok perkara, Termohon menolak seluruh dalil Pemohon yang disampaikan Pemohon, kecuali apa yang tegas dan bulat diakui oleh Termohon. Bahwa bila dipelajari secara seksama seluruh dalil Pemohon yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran, khususnya pelanggaran yang di dalilkan dapat dikonstantir merupakan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat kasuistis, seporadis dan tidak berkolerasi secara signifikan dengan perolehan hasil. Provinsi Lampung tabel persandingan, ada 2 tabel dianggap dibacakan.

Bahwa tidak benar dalam tahap proses penyelenggaraan pemilihan umum di daerah Lampung II ditemukan banyak pemilih yang tidak menerima undangan untuk memilih atau Form C-6. Hal ini terjadi di 7 Kabupaten di Dapil Lampung II.

Bahwa merupakan fakta hukum, Pemohon tidak secara rinci menyebutkan daerah-daerah mana saja yang didalilkan terjadinya pelanggaran pengurangan suara di Dapil Lampung II.

Bahwa dalam Permohonan angka 3, halaman 6, Permohonan Pemohon tidak jelas. Dimana Pemohon tidak secara jelas menerangkan pada TPS mana dan C-1 mana telah terjadi perubahan hasil rekapitulasi hasil suara sehingga dalil yang disampaikan tidak berdasarkan hukum.

Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan menemukan perbedaan penghitungan suara pada C-1 dan C-1 Plano yang diperoleh Pemohon melalui foto dari TPS yang intinya jumlah perolehan suara Pemohon pada C-1 lebih rendah dari hasil penghitungan C-Plano dikarenakan Pemohon tidak dapat menyebutkan secara rinci di daerah

mana saja yang ada kejadian perbedaan kesalahan penghitungan suara tersebut.

Bahwa Pemohon ingin melakukan pemungutan suara lanjutan terhadap para pemilih yang belum menggunakan hak pilihnya pada Dapil Lampung II.

Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Termohon sebagai terurai di atas, kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa Termohon dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukan, serta menjaga agar pemilihan umum calon anggota DPR-RI secara serentak dapat sesuai dengan benar dan berkualitas.

Kota Bandar Lampung berkaitan dengan tabel dianggap dibacakan. Ini berkaitan tentang perolehan suara partai politik dan perolehan suara suara calon anggota DPRD Roy Dwi Suryono, Partai Gerindra Nomor Urut 1.

Bahwa terurai dalam di ... di Kelurahan Sukadana Ham eh ... Ham di TPS 07. Bahwa fakta hukum di TPS 07 Kelurahan Sukadana Ham tertulis dalam data pada C-1 Plano adalah benar. Selisih perbedaan data dengan DAA-1 dikarenakan terjadinya salah input antara caleg Nomor 2 atas nama Dafryan Angara dengan caleg Nomor Urut 3 atas nama Rostiana Rauf.

Seharusnya suara caleg Nomor Urut 2 atas nama Dafryan Angara adalah 0 suara caleg Nomor Urut 3 atas nama Rostiana Rauf adalah 1 suara. Di kelurahan Sukadana Ham, Kelurahan Sukajawa Baru TPS 8, Kelurahan Kepala Tiga Permai TPS 13, dan seterusnya, Yang Mulia. Eh ... kami jawab secara ini saja bahwa ... karena ini sama modelnya ke inian apa ... modus itunya sama.

Bahwa pada TPS 21 Kelurahan Sukajawa, Kecamatan Tanjung Karang Barat. Benar ada data pada DAA selisih perbedaan antara dengan C-1 Pleno.

Bahwa pada perkapitalis tingkat kecamatan ada kesepakatan antara saksi partai, panwascam, dan PKK Kecamatan Tanjung Karang Barat ... ya Kirang Barat, untuk melakukan hitung ulang dengan membuka TPS-21.

Bahwa keputusan diambil karna ada perbedaan antara C-1 Hologram, C-1 salinan saksi, dan C-1 Plano. Setelah dilakukan penghitungan, perolehan suara calon anggota legislatif Nomor Urut 1 atas nama Roy Dwi Suryono adalah 4 suara. Calon Nomor Urut 2 atas nama Dafryan Angara adalah 3 suara. caleg Nomor Urut 3 atas nama Rostiana Rauf adalah 1 suara, vide Bukti Form C-1 Plano, TPS 21, Form DAA-1, TPS 21. Di Kelurahan Sukajawa juga sama, saya anggap dibacakan. Sama dianggap dibacakan di TPS-TPS lanjutan termasuk di ... di ... di ... di ... untuk pengisian anggota DPR Kota Bandar Lampung Daerah Pemilihan II, meliputi TPS 1 dan seterusnya sampai dengan TPS 12 ini sama ke ... ke vide bukti kami, Termohon (...)

88. KETUA: ASWANTO

Ya.

89. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN NOMOR 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA

Saya rasa untuk poin 14, 15 di halaman 13 itu pun sama, Yang Mulia.

90. KETUA: ASWANTO

Baik.

91. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN NOMOR 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA

Dianggap dibacakan. Bahwa untuk Kabupaten Tanggamus, persandingan perolehan suara partai politik menurut Termohon dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR Kabupaten Tanggamus Dapil Tanggamus. Bahwa (...)

92. KETUA: ASWANTO

Ini Dapil Tanggamus I, ya?

93. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN NOMOR 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA

Ya. Tanggamus I ... Dapil Tanggamus I bahwa pada saat dilaksanakan rapat pemungutan dan perhitungan hasil suara pada tingkat TPS daerah pemilihan Tanggamus I yang dihadiri oleh saksi partai politik termasuk Pemohon, saksi Pemohon, dan pada saat itu tidak terdapat keberatan yang berarti baik yang disampaikan oleh saksi maupun pengawas TPS sebetulnya.

Poin selanjutnya kami anggap bacakan. Termasuk tabelnya hasil ... hasil perolehan menurut Termohon ... tabel persandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon untuk ... untuk desa Kelurahan Sanggi juga kami anggap bacakan karena ini sudah disandingkan dengan alat bukti kami. Tinggal itu, kami anggap bacakan.

94. KETUA: ASWANTO

Langsung ke Petitem, ya?

95. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN NOMOR 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA

Sehingga dengan demikian dalam ... dalam Petitem kami yang pertama, dalam Eksepsi, mengabulkan Eksepsi Termohon. Dalam pokok perkara, menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan benar dan tetap berlaku surat Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 98 dan seterusnya. Me ... 987 dan seterusnya. Menetapkan suara perolehan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Lampung 2 dan DPRD Kota Bandar Lampung di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah perolehan suara Pemohon calon anggota DPR RI untuk pengisian anggota DPR RI Dapil Lampung, atas nama Bob Hasan, perolehan suaranya 29.796. Untuk perolehan suara Pemohon calon anggota DPRD Kabupaten Lampung, Kota Bandar Lampung, Dapil II Kota Bandar Lampung, calon anggota DPRD atas nama Roy Dwi Suryono perolehan suaranya 977. Atas nama Dafryan Angara perolehan suaranya 1.155. Untuk perolehan suara Pemohon calon anggota DPRD Kabupaten Kota Kabupaten Tanggamus, partai politik Partai Gerindra perolehan suaranya 2.653, PDIP=13.797 atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih.

96. KETUA: ASWANTO

Ada konfirmasi dulu?

97. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Terima kasih, Yang Mulia. Yang dibacakan oleh Pak Berna itu yang tertanggal berapa dari jawabannya karena (...)

98. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN NOMOR 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA

Yang 11 ... yang perbaiki ... jawaban perbaiki (...)

99. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya. Jadi ada di sini yang kita terima tanggal 8, tapi tanggal dari jawaban itu tanggal 9 Juli.

100. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN NOMOR 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA

Oh

101. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Sepertinya itu yang Saudara baca.

102. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN NOMOR 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA

Betul ...betul, ya.

103. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, jadi yang mana? Karena yang terakhir ada kita baca juga perbaikan tanggal ... tertanggal jawaban 12 Juli, kita terima juga 12 Juli. Kalau (...)

104. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN NOMOR 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA

Oh, yang 9.

105. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, yang mana? Ini yang (...)

106. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN NOMOR 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA

Yang tanggal 9.

107. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Jadi yang tanggal 9, ya?

108. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN NOMOR 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA

Ya.

109. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Begitu itu yang ... yang dipedomani, ya?

110. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN NOMOR 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA

Ya.

111. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, karena saya liat berb ... agak berbeda.

112. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN NOMOR 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA

Agak berbeda, ya betul. Ada perbaiki.

113. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Benar, ya? Nah ini yang sedang dikonfirmasi (...)

114. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN NOMOR 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA

Ya, betul.

115. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Jadi yang tanggal jawaban 9 Juli, kita terima 8 ... sebetulnya kita terima 8 Juli ini, ya? Jadi ini, ya?

116. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN NOMOR 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA

Ya.

117. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, terima kasih.

118. KETUA: ASWANTO

Cukup, Yang Mulia?

119. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Cukup.

120. KETUA: ASWANTO

Baik, ada ...
Selanjutnya Pihak Terkait. (...)

121. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48-14-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Izin, Yang Mulia.

122. KETUA: ASWANTO

Ya?

123. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48-14-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Jadi, kami juga belum ada dapat jawaban dari Termohon, Yang Mulia. Ada jawaban, tapi jawabannya yang lain, Yang Mulia.

124. KETUA: ASWANTO

Baik. Ini kan kita semua jawaban-jawaban itu termasuk yang dibacakan kan ini kan yang perbaiki ... perbaikan jawaban. Itu kita sudah upload, tapi kalau Bapak belum dapat bisa diminta dibagian Kepaniteraan. Nanti kita copy-kan, ya? Jelas, ya?

125. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48-14-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Ya, Yang Mulia.

126. KETUA: ASWANTO

Baik. Silakan Pihak Terkait!

127. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TANDA PERDAMAIAN NASUTION

Terima kasih, Yang Mulia. Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 akan menyampaikan keterangan pada intinya pad ... hanya pokok-pokoknya saja, Yang Mulia, yang kami sampaikan. (...)

128. KETUA: ASWANTO

Ya.

129. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TANDA PERDAMAIAN NASUTION

Dapil Tanggamus I, pada intinya Pemohon ini mendalilkan Pemohon kehilangan 32 suara di Dapil Tanggamus I dan adanya penambahan suara PDI Perjuangan sebanyak 1.122 suara. Bahwa secara tegas, kami sampaikan, Yang Mulia. Dalil-dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar.

Kami lanjut, Yang Mulia, ke halaman 4 unt ... tabel persandingan tabel 2 ini, Yang Mulia, saya ingin membacakan sedikit. Untuk Kecamatan Bandar Negeri Semuong, itu TPS 4 Pekon Sanggi, suara Pihak Terkait adalah 73 suara, bukan 72 suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Kemudian, di TPS dela ... TPS 8 Pekon Sanggi juga suara Pihak Terkait itu adalah 60 suara, bukan 50 suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Kemudian di TPS 11, suara Pihak Terkait adalah 47 suara, bukan 38 suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Bahwa total perolehan suara Pihak Terkait di 4 ... di TPS 4, 8, 11 Pekon Sanggi adalah 180 suara, bukan 160 suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon.

Kemudian di TPS 3 Sinar Bangun, suara Pihak Terkait itu adalah 23 suara, bukan 13 suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Kemudian, TPS 4 Pekon Atar Lebar, itu suara Pihak Terkait adalah 52

suara, bukan 44 suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Kemudian, TPS 3 Pekon Tulung Sari, suara Pihak Terkait di TPS 3 ini adalah 33 suara, bukan 1 suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Kemudian, TPS 3 Pekon Rajabasa, suara Pihak Terkait adalah 27 suara, bukan 17 suara. Kemudian, di TPS 2 Pekon Gunung Doh itu suara Pihak Terkait itu adalah 17 suara, bukan 12 suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Jadi, total perolehan suara PDI Perjuangan atau Pihak Terkait di Kecamatan Bandar Negeri Semuong ini adalah 332 suara, bukan 247 suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon.

Kemudian, untuk di Kecamatan Semaka, Yang Mulia. di TPS 3 itu suara Pihak Terkait itu sebetulnya ... apa ... suara Pihak Terkait adalah 98 suara, bukan 48 suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Kemudian, di TPS 4 Pekon Kacapura itu suara Pihak Terkait adalah 107 suara, bukan 82 suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Kemudian di TPS 5, suara Pihak Terkait adalah 18 suara, bukan 8 suara, Yang Mulia, seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Kemudian di TPS 2 Pekon Margomulyo suara Pihak Terkait adalah 142 suara, bukan 22 suara. Kemudian, di TPS 1 Pekon Bangunrejo, suara Pihak Terkait adalah 64 suara, bukan 45 suara. Kemudian di TPS 7 Pekon Sedayu, suara Pihak Terkait itu adalah 115 suara, bukan 93 suara. Kemudian di Pekon Sukaraja TPS 4, di TPS 4 itu suara Pihak Terkait adalah 156 suara, bukan 6 suara. Kemudian di TPS 5, suara Pihak Terkait itu adalah 133 suara, bukan 33 suara. Kemudian, di TPS 6 itu suara Pihak Terkait adalah 187 suara, bukan 87 suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Kemudian, di TPS (...)

130. KETUA: ASWANTO

Jadi, di catatan Saudara, apakah perolehan suara yang Anda peroleh yang menurut Anda itu sesuai dengan Termohon?

131. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TANDA PERDAMAIAN NASUTION

Ya, benar, Yang Mulia. Pada intinya, sama seperti yang disampaikan oleh Termohon, Yang Mulia.

132. KETUA: ASWANTO

Ya.

133. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TANDA PERDAMAIAN NASUTION

Jadi, untuk mempersingkat waktunya saja, Yang Mulia.

134. KETUA: ASWANTO

Ya.

135. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TANDA PERDAMAIAN NASUTION

Saya hanya tabulisasi per kecamatan saja.

136. KETUA: ASWANTO

Ya.

137. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TANDA PERDAMAIAN NASUTION

Ke ... untuk di Kecamatan Semaka, itu peroleh ... total perolehan suara Pihak Terkait adalah 1.264 suara, bukan lima ratus lipan ... 518 suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon, Yang Mulia. Kemudian, suara Pemohon di Kecamatan Semaka ini adalah 18 suara, Yang Mulia, bukan (...)

138. KETUA: ASWANTO

Di halaman ... itu di halaman berapa, Pak Tanda?

139. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TANDA PERDAMAIAN NASUTION

Itu di halaman 9, Yang Mulia.

140. KETUA: ASWANTO

Ya.

141. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TANDA PERDAMAIAN NASUTION

Kemudian, lanjut ke halaman 12, rekapitulasinya ha ... untuk di Kecamatan Sawa, itu perolehan suara Pihak Terkait itu adalah 603 suara, bukan 312 suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon, Yang Mulia.

142. KETUA: ASWANTO

Ya.

143. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TANDA PERDAMAIAN NASUTION

Kemudian, suara Pemohon itu di TP ... di Kecamatan Pematang Sawa itu 21 suara, bukan=42 suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, dalil Permohonan Pemohon tidak terbukti dan sudah selayaknya Mahkamah Konstitusi menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Petitum, Yang Mulia.

144. KETUA: ASWANTO

Ya.

145. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TANDA PERDAMAIAN NASUTION

Dalam pokok perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
 2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987 dan seterusnya.
 3. Menetapkan perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Tanggamus, Daerah Pemilihan I yang benar adalah suara Pemohon itu 2.653. Kemudian, suara PDI Perjuangan=13.797 suara. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.
- Terima kasih, Yang Mulia.

146. KETUA: ASWANTO

Baik. Selanjutnya Pihak Bawaslu, keterangan Bawaslu.

BAWASLU: ISKARDO P. PANGGAR

Baik, Yang Mulia. Izin kami menyampaikan keterangan tertulis terkait dengan register Perkara Nomor 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

Yang pertama bahwa kami menyampaikan terhadap dalil Pemohon di atas. Bahwa di TPS 2 Kelurahan Margorejo, adanya pembukaan kotak suara dan penghitungan suara ulang. Kami menyampaikan, pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan pada pemilu 2019 di Metro Selatan, pada tanggal 24 April 2019, pada TPS 2 Margorejo, ditemukan selisih antara surat suara sah dan tidak sah dengan jumlah sebagaimana tabel, kami anggap dibacakan.

Kemudian setelah dilakukan penjumlahan perolehan suara sah seluruh partai politik di salinan Model C-1 DPRD Kabupaten ... di DPRD Kota Metro, kami sampaikan suara sah berjumlah 225 dan suara tidak sah berjumlah 7, sehingga total jumlah 232.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, terdapat ketidaksesuaian dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah, yaitu berjumlah 231 dan kemudian berujung untuk pembukaan atau pencocokan dengan C-1 Plano. Atas dasar hal tersebut, saksi Partai Kebangkitan Bangsa mengusulkan untuk membuka kotak suara untuk menghitung surat suara yang tidak sah pada perolehan suara DPRD Kota Metro.

Selanjutnya Panitia Pemilihan Kecamatan Metro Selatan atas pertesu ... persetujuan semua saksi partai politik yang hadir, kecuali Partai Keadilan Sejahtera yang setuju dengan syarat untuk pembukaan surat suara di TPS 2 Margorejo agar langsung dilakukan pembukaan kotak suara. Kemudian didapati surat suara tidak sah berjumlah 7 dan suara sah berjumlah 224. Dengan demikian, masih ditemukan selisih dengan jumlah perolehan suara, masih ditemukan selisih dengan jumlah perolehan suara.

Selanjutnya, disepakati kembali untuk dilakukan penghitungan ulang surat suara sah maupun surat suara tidak sah berdasarkan persetujuan para saksi partai politik peserta pemilu yang hadir dan rekomendasi lisan dari Panwaslu Kecamatan Metro Selatan. Dalam proses penghitungan suara ulang di DPRD Kota Metro ini diperoleh rincian sebagaimana ... sebagai berikut. Sebagaimana tabel yang kami sampaikan, kami anggap dibacakan.

Bahwa setelah dilakukan penghitungan suara ulang, surat suara diperoleh suara sah berjumlah 225 dan suara tidak sah berjumlah 6. Sehingga jumlah tersebut menjadi sesuai dengan jumlah keseluruhan surat suara sah dan surat suara tidak sah dengan jumlah 231.

Kemudian, dari hasil penghitungan surat suara ulang, saksi PKS menyatakan keberatan dan menyampaikan keberatannya kepada PPK Metro Selatan terkait hilangnya surat suara yang diperoleh PKS

sebelumnya pada TPS 02 Margorejo dan TPS 09 Rejomulyo terkait telah terjadi penghitungan suara ulang.

Bahwa PPK Metro Selatan atas persetujuan semua saksi partai poli ... politik yang hadir, maaf, Yang Mulia. Kami lanjutkan, terhadap pokok permohonan adanya perbedaan perolehan jumlah suara Partai Kebangkitan Bangsa di TPS 09 Kelurahan Rejomulyo, pada salinan Model C-1 DPRD Kota Metro, Pemohon dengan foto dan rincian perolehan suara partai politik dan suara calon pada foto Model C-1 Plano milik Pemohon. Yang pertama, kami sampaikan bahwa di TPS 09, Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Metro Selatan, Pemohon mengajukan koreksi kepada PPK atas jumlah suara Partai Nomor 1, yaitu bukanlah 7 suara, tetapi seharusnya hanya 4 suara. Hal ini berdasarkan salinan penghitungan suara salinan Model C-1 DPRD Kota Metro milik Pemohon.

Pada data rincian perolehan suara partai politik dan suara calon milik Pemohon, kemudian dicocokkan dengan foto data rincian perolehan suara partai politik dan suara calon milik panwas dan data rincian perolehan suara partai politik dan suara calon (ucapan tidak terdengar jelas) adalah yaitu sama 4 suara setelah semua pihak menyesuaikan suara Partai Nomor 1 adalah 4 suara.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kota Metro Selatan pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan, pada pemilu 2019 di Kecamatan Metro Selatan, pada hasil penghitungan perolehan suara sampai pada TPS 09 Rejomulyo, saksi Partai PKS mengajukan keberatan terhadap perolehan suara yang didapat Partai Kebangkitan Bangsa yang di mana berdasarkan salinan Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Metro hologram, perolehan suara PKB berjumlah 7, dan berdasarkan foto C-1 Plano yang dimiliki saksi PKS, jumlah suara yang dimiliki PKB adalah berjumlah 4.

Berdasarkan hal tersebut dan berdasarkan kesepakatan, maka dibukalah C-1 Plano untuk mencocokkan. Kemudian dari hasil melihat C-1 Plano yang telah dibuka dalam kotak suara dan hasil perolehan suara PKB adalah berjumlah 4 suara.

147. KETUA: ASWANTO

Ini saya sela sedikit. Jadi, apa yang dipersoalkan oleh Pemohon dan ada laporannya ke Bawaslu itu sudah tidak ... sudah ditindaklanjuti?

148. BAWASLU: ISKARDO P. PANGGAR

Sudah ditindaklanjuti.

149. KETUA: ASWANTO

Ya.

150. BAWASLU: ISKARDO P. PANGGAR

Sesuai rekom panwas.

151. KETUA: ASWANTO

Baik.

152. BAWASLU: ISKARDO P. PANGGAR

Yang Mulia.

153. KETUA: ASWANTO

Kalau begitu ke Perkara Nomor 48-14-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019! Kecuali ada yang belum di ... ini ya, belum direspon, ya. Kalau sudah ditindaklanjuti semua, kita bisa pindah ke Perkara Nomor 48-14-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

154. BAWASLU: ISKARDO P. PANGGAR

Ya. Jadi sudah ditindaklanjuti, Yang Mulia kemudian di keterangan tertulis kami yang lengkap ini juga sudah kami sandingkan hasilnya.

155. KETUA: ASWANTO

Baik.

156. BAWASLU: ISKARDO P. PANGGAR

Antara perolehan suara sebelum pembukaan dan setelah pembukaan (...)

157. KETUA: ASWANTO

Baik.

158. BAWASLU: ISKARDO P. PANGGAR

Dan setelah penghitungan ulang.

159. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih. Perkara Nomor 48-14-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019! Oh, ini ganti, ganti supir.

160. BAWASLU: FATIKHATUL KHOIRIYAH

Mohon izin, Yang Mulia.

161. KETUA: ASWANTO

Silakan!

162. BAWASLU: FATIKHATUL KHOIRIYAH

Melanjutkan untuk Perkara Nomor 48-14-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Demokrat. Bahwa terhadap pokok Permohonan yang disampaikan oleh Pemohon, Bawaslu Kabupaten Lampung Timur, pada saat rekapitulasi di Kabupaten Lampung Timur mendapat laporan keberatan dari Pemohon dan kemudian direkomendasikan oleh Bawaslu Kabupaten Lampung Timur untuk dilakukan pencermatan terhadap C-1 KPU dan C-1 Pemohon di Kecamatan Labuhan Maringgai.

Dari hasil rekapitulasi perolehan suara di tingkat kabupaten, untuk calon DPRD Provinsi Lampung atas nama Yandri, diperoleh suara sebanyak 16.431. Sedangkan untuk Asep Makmur sebanyak 16.717 suara.

Kemudian di Kecamatan Labuhan Maringgai yang direkomendasikan oleh Bawaslu Kabupaten Lampung Timur untuk dilakukan pencermatan ulang, didapati bahwa ada selisih antara ... di Desa Labuhan Maringgai untuk perolehan suara calon anggota DPRD provinsi ... Partai Demokrat Nomor Urut 5 atas nama Asep Makmur mendapat 57 suara. Sedangkan dari data C-1, Pemohon mendapat 7 suara, sehingga terdapat selisih 50 suara.

Bahwa berdasarkan hasil penelusuran, pengawasan, serta data C-1 dari pengawas TPS 02, Desa Labuhan ... Desa Maringgai, Panwas Kecamatan Labuhan Maringgai, perolehan suara anggota DPRD Provinsi Lampung Nomor Urut 5 atas nama Asep Makmur mendapat suara 7 suara. Tetapi, dalam DAA-1 DPRD provinsi mendapat 57 suara, dan itu dilakukan koreksi di dalam rekapitulasi KPU Kabupaten Lampung Timur.

Kemudian pada rekapitulasi di tingkat provinsi, Saudara Pemohon masih mengajukan keberatan terhadap hasil perolehan yang sudah ditetapkan oleh KPU Lampung Timur. Kemudian setelah kami melakukan pancermatan dari data yang disampaikan, Bawaslu Provinsi Lampung menyampaikan rekomendasi kepada KPU Provinsi Lampung untuk melakukan pencermatan kembali terhadap selisih yang disampaikan, dan apabila ditemukan kesalahan agar dapat dilakukan pembetulan atau perbaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada waktu itu kami beri tenggang waktu 1 hari untuk (...)

163. KETUA: ASWANTO

Rekomendasi itu di (...)

164. BAWASLU: FATIKHATUL KHOIRIYAH

Di dalam rekapitulasi provinsi.

165. KETUA: ASWANTO

Ya. Rekomendasi itu sudah dilaksanakan?

166. BAWASLU: FATIKHATUL KHOIRIYAH

Sudah dilaksanakan.

167. KETUA: ASWANTO

Ya.

168. BAWASLU: FATIKHATUL KHOIRIYAH

Dan dilaksanakan rekomendasi kami itu di KPU Lampung Timur, dilakukan pengecekan, dan kemudian pelapor ... Pemohon keberatan karena yang bersangkutan pada saat pembukaan kotak di KPU Kabupaten Lampung Timur tidak ada, tetapi hanya saksi dari partai ... dari DPC Demokrat Lampung Timur.

Kemudian, selanjutnya kami rekomendasikan untuk dibawa ke forum pleno besar di provinsi, dan disaksikan langsung oleh yang bersangkutan, dan dari hasil yang disandingkan terhadap 5 kecamatan yang diajukan, hanya ada selisih di 2 TPS, yaitu di TPS 5 Desa Jepara, dan di TPS 49 Bandar Agung. Dan itu kemudian juga sudah dilakukan perbaikan di dalam forum rekapitulasi di tingkat provinsi.

169. KETUA: ASWANTO

Ya.

170. BAWASLU: FATIKHATUL KHOIRIYAH

Demikian pada poin yang disampaikan untuk Perkara Nomor 48-14-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Demokrat.

Jadi, hasil akhir dari pengawasan yang kita lakukan untuk Calon DPRD Provinsi Nomor Urut 1 atas nama Yandri Nazir berjumlah 16.441. Dan Calon Nomor Urut 5 atas nama Asep Makmur berjumlah 16.717.

171. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih.

172. BAWASLU: FATIKHATUL KHOIRIYAH

Terima kasih.

173. KETUA: ASWANTO

Ganti supir lagi?

174. BAWASLU: FATIKHATUL KHOIRIYAH

Ya, Majelis.

175. KETUA: ASWANTO

Baik. Ini karena tiga-tiganya pakai SPPD, tiga-tiganya harus bicara, ya? Silakan! Nanti Pak Ustad Afif yang bisa menilai yang bisa diperpanjang, nanti. Silakan, Pak.

176. BAWASLU: TAMRI SUHAIMI

Ya. Izin, Yang Mulia. Menyampaikan keterangan terkait dengan register Nomor Perkara 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

177. KETUA: ASWANTO

Indikatornya, Pak Afif, yang bisa meringkgas dengan bagus, itu yang bisa diperpanjang. Yang Panjang lebar itu perlu dilatih kemudian ... perlu dilatih kembali. Silakan!

178. BAWASLU: TAMRI SUHAIMI

Terkait dengan dalil yang diampaikan oleh Pemohon tentang distribusi C-6, kami sudah menyampaikan lewat keterangan tertulis, seperti yang tabel-tabel yang sudah kami sampai di beberapa kabupaten karena memang ini tidak menyampaikan titik yang dipermasalahkan, sehingga kami menyampaikan secara global terkait dengan distribusi C-6.

Kemudian, Yang Mulia, terkait dengan ada tiga TPS yang didalilkan oleh Pemohon, terkait dengan caleg DPR RI atas nama Bob Hasan. Bawaslu menerangkan bahwa terhadap dalil Pemohon yang

menyatakan bahwa pada TPS 6, Desa Dwi Jaya, Kecamatan Banjar Agung, terdapat selisih 27 suara. Terkait dengan hal tersebut, hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang dijelaskan sebagai berikut. Kami sajikan dalam tabel ... saya ... kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

Kemudian terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa pada TPS 1, Desa Banjar Dewa, Kecamatan Banjar Agung, terdapat selisih 2 suara. Terkait dengan hal tersebut, hasil pengawasan Bawaslu Lampung ... Tulang Bawang dijelaskan sebagai berikut. Bahwa suara Bob Hasan berdasarkan C-1 Plano yang dipunyai oleh Bawaslu, yaitu 4. Salinan C-1=4 dan DAA-1 juga 4. Sehingga, tidak ada selisih suara yang kami temukan.

Kemudian terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa pada TPS 1, Desa Cempaka Dalam, Kecamatan Menggala Timur, terdapat selisih 64 suara. Terkait dengan hal tersebut, pengawas pemilu, Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang menjelaskan bahwa pada TPS tersebut tidak ada selisih antara C-1 Plano, salinan C-1, dan DAA-1 DPR RI yang apa ... dipunyai oleh Bawaslu. Kemudian, untuk Dapil Bandar Lampung, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Bandar Lampung, kami informasikan bahwa Yang Mulia memang di Bandar Lampung ini, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu, semua TPS yang ada di Bandar Lampung ini sudah dibuka C-1 Plano untuk setiap TPS di seluruh Kota Bandar Lampung, namun kami menemukan dari sekian yang disampaikan ... yang didalilkan oleh Pemohon, kami menemukan memang ada 4 TPS yang berbeda antara C-1 Plano dengan DAA-1, yaitu di TPS 7 Sukadana Ham, kemudian TPS 26 Suka Jawa, TPS 21 Sukadana Ham, kemu ... ini dihitung ulang. Kemudian, di TPS 12 Gotong Royong.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pemilu pada ... pengawas pemilu pada saat pleno rekapitulasi perhitungan suara di Kecamatan Tanjung Karang Barat pada Minggu, 21 April 2019, pukul 09.00 WIB, di Kelurahan Sukadana Ham, TPS 1, telah dilaksanakan. Bahwa berdasarkan hasil pencermatan dan penyusunan data C-1 Plano, Model DAA-1 DPRD Kota Bandar Lampung, pada TPS 1 Kelurahan Sukadana Ham terdapat perolehan hasil suara pemilihan Kota Bandar Lampung dan Partai Gerindra sebagai berikut, yaitu tidak ada selisih. Kemudian di Kelurahan TPS 7, Sukadana Ham ini memang ada selisih 1 suara untuk apa ... Nomor Urut ... Caleg atas nama Dafryan Angara yang berdasarkan C-1 Plano itu 0, kemudian berdasarkan DAA, 1 suara, sehingga selisih 1 suara.

Kemudian, berdasarkan hasil pengawasan pengawas pemilu pada saat pleno di Kecamatan Tanjung Karang Barat, pada hari Senin, tanggal 24 April 2019, pukul 19.30 WIB di Kelurahan Suka Jawa, TP ... TPS 1 ditemukan kesalahan perhitungan suara sah dikarenakan pemilih yang mencoblos partai dan calon legislatif dihitung masing-masing 1 suara,

sehingga terjadi selisih antara jumlah suara sah dan jumlah pemilih. Maka, Panwaslu Kecamatan Tanjung Karang Barat beserta saksi pem ... peserta pemilu yang hadir, merekomendasikan kepada PPK Tanjung Karang Barat untuk dilakukan pembetulan rekapitulasi hasil perhitungan suara dengan membuka kotak suara dan melakukan perhitungan suara ulang pada TPS 21, Kelurahan Suka Jawa.

Setelah dilakukan perhitungan suara ulang, disajikan dalam tabel sebagai berikut. Di TPS 21, berdasarkan C-1 Plano, atas nama Roy Dwi Suryo=5 suara, Dafryan Angara=4 suara, kemudian berdasarkan hasil perhitungan surat suara ulang, Roy Suryo ... Roy ... Roy Dwi Suryono itu 4 suara, kemudian Dafryan Angara=3 suara, sehingga ditemukan selisih 1 suara untuk Roy Dwi Suryono dan 1 suara juga untuk Dafryan Angara ... Da ... Dafryan Angara.

Kemudian, untuk Dapil Tanggamus I, Yang Mulia. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan panwaslu kecamatan, kami sajikan per kecamatan di Kelurahan Bandar Negeri Semuong bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Bandar Negeri Semuong, pada tanggal 22 April 2019, terhadap tahapan rekapitulasi perhitungan suara (...)

179. KETUA: ASWANTO

Yang ... yang disampaikan yang ... yang ada masalah saja, Pak.

180. BAWASLU: TAMRI SUHAIMI

Yang disampaikan, yaitu (...)

181. KETUA: ASWANTO

Kalau secara umum perolehan suara untuk masing-masing kecamatan KPU juga sudah memasukkan itu, yang ada persoalan kecamatan mana, Pak?

182. BAWASLU: TAMRI SUHAIMI

Ya, di Bandar Negeri Semuong, Yang Mulia. Kita menemukan memang ada perbedaan di TPS 4 Pekon Atar Lebar, yaitu eh ... ada perbedaan di Partai PDIP berdasarkan perolehan suara C-1 Plano yang perolehan suara sah sebelum buka C-1 Plano, di sini buka C-1 Plano itu PDI Nomor Urut 1 caleg Nomor Urut 1=0. Kemudian, Didik Setiawan=2. Sehingga di sini ada ditemukan ada perbedaan di caleg PDI Nomor Urut 4 atas nama Azmi yang sebelum dibuka C-1 Plano itu 0, setelah dibuka C-1 Plano berjumlah 36. Sehingga, ada penambahan 36 di ... atas nama Azmi Nomor Urut 4 dari PDIP.

183. KETUA: ASWANTO

Apa tindak lanjutnya itu?

184. BAWASLU: TAMRI SUHAIMI

Dibetulkan oleh PPK itu.

185. KETUA: ASWANTO

Dibetulkan di tingkat PPK?

186. BAWASLU: TAMRI SUHAIMI

Di tingkat PPK.

187. KETUA: ASWANTO

Ya, berarti sudah klir kan?

188. BAWASLU: TAMRI SUHAIMI

Sudah klir.

189. KETUA: ASWANTO

Ya.

190. BAWASLU: TAMRI SUHAIMI

Kemudian di Kecamatan Semaka, kita juga menemukan TPS 2 Pekon Garut yang eh ... mendap ... ditemui ada keberatan saksi dari PDIP.

191. KETUA: ASWANTO

Ya.

192. BAWASLU: TAMRI SUHAIMI

Tetapi ini juga sudah dibetulkan di tingkat PPK. Kemudian, di Pematang Sawah di TPS 3 Karang Barat ini juga dibuka kotak suara dan hasilnya sudah ditindaklanjuti oleh PPK. Sehingga, seluruh yang disampaikan dalam Permohonan hanya ada 3 TPS yang kita temui

memang ada keberatan dari saksi dan itu sudah ditindaklanjuti oleh PPK. Demikian, Yang Mulia.

193. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih.

194. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TANDA PERDAMAIAN NASUTION

Izin, Yang Mulia. Ada renvoi, salah ini belum diperbaiki tadi, Yang Mulia hanya (...)

195. KETUA: ASWANTO

Yang mana

196. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TANDA PERDAMAIAN NASUTION

Di-drop saja, Yang Mulia.

197. KETUA: ASWANTO

Yang mana di-drop?

198. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TANDA PERDAMAIAN NASUTION

Ini halaman 6.

199. KETUA: ASWANTO

Ya.

200. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TANDA PERDAMAIAN NASUTION

Itu perolehan suara di Kecamatan Bandar Negeri Semuong itu tabelnya dihapus itu (...)

201. KETUA: ASWANTO

Bandar, sebentar ... Bandar Negeri Semuong?

202. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TANDA PERDAMAIAN NASUTION

Ya, tabelnya dihapus, Yang Mulia.

203. KETUA: ASWANTO

Oke.

204. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TANDA PERDAMAIAN NASUTION

Terus, kemudian (...)

205. KETUA: ASWANTO

Di halaman berapa, Pak Tanda?

206. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TANDA PERDAMAIAN NASUTION

Halaman 6, Yang Mulia.

207. KETUA: ASWANTO

Ya.

208. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TANDA PERDAMAIAN NASUTION

Tabelnya ... perolehan suara di Kecamatan Bandar Negeri Semuong dihapus, berikut tabelnya. Kemudian, angka 1.16 dihapus, Yang Mulia.

209. KETUA: ASWANTO

Ya.

210. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TANDA PERDAMAIAN NASUTION

Kemudian, eh ... di halaman 9, itu perolehan suara Pihak Terkait di ... dan Pemohon di Kecamatan Semaka juga dihapus tabelnya, Yang Mulia.

211. KETUA: ASWANTO

Ya.

212. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TANDA PERDAMAIAN NASUTION

Kemudian, 1.31, 1.32 juga dihapus, Yang Mulia.

213. KETUA: ASWANTO

Ya.

214. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TANDA PERDAMAIAN NASUTION

Kemudian, halaman 12 itu perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon di Kecamatan Pematang Sawah berikut tabelnya juga dihapus. Kemudian, poin 1.30 dan 131 juga dihapus, Yang Mulia.

215. KETUA: ASWANTO

Baik.

216. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TANDA PERDAMAIAN NASUTION

Jadi, tadi yang saya bacakan itu, saya ralat sedikit, yang saya bacakan hanya yang per TPS tadi saja, Yang Mulia. Berikut Petitumnya saja.

217. KETUA: ASWANTO

Baik.

218. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TANDA PERDAMAIAN NASUTION

Karena ada kesalahan hitung di sini, Yang Mulia.

219. KETUA: ASWANTO

Baik, baik.

220. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TANDA PERDAMAIAN NASUTION

Terima kasih, Yang Mulia.

221. KETUA: ASWANTO

Baik, Bawaslu ada tambahan?

222. BAWASLU: FATIKHATUL KHOIRIYAH

Ya, bisa menambahkan, Yang Mulia, sedikit.

223. KETUA: ASWANTO

Ya, silakan!

224. BAWASLU: FATIKHATUL KHOIRIYAH

Terkait dengan pada saat pembacaan Permohonan dari Pemohon untuk dari Gerindra caleg DPR-RI.

225. KETUA: ASWANTO

Sebentar, Gerindra itu nama (...)

226. BAWASLU: FATIKHATUL KHOIRIYAH

Atas nama Bob Hasan.

227. KETUA: ASWANTO

Ya.

228. BAWASLU: FATIKHATUL KHOIRIYAH

Ya, yang menyatakan bahwa banyak pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya di Dapil II DPR-RI Lampung. Kami menyampaikan bahwa Bawaslu provinsi maupun Bawaslu yang ada di Dapil II Lampung tidak pernah menerima laporan terkait atau juga menemukan adanya pemilih yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya di Dapil II.

229. KETUA: ASWANTO

Baik.

230. BAWASLU: FATIKHATUL KHOIRIYAH

Terima kasih, Yang Mulia.

231. KETUA: ASWANTO

Ya, ini anggota Bawaslu-nya hati-hati karena ada Pak Afifuddin di situ, ya. Sebenarnya kalau seleksi untuk periode berikutnya salah satu apa ... sumber untuk menentukan di sidang MK gitu, ya. Salah satu bahan pertimbangan.

Baik, kita sekarang sahkan alat bukti, tapi sebelumnya ini ada klarifikasi untuk Pihak Terkait PDIP. Ini Surat Kuasanya glondongan, ya?

232. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TANDA PERDAMAIAN NASUTION

Benar, Yang Mulia. Dan kemarin setelah konsultasi dengan Kepaniteraan, kita disuruh leges ke DPP Partai dan juga disegel di bawah dan itu tadi pagi kita sudah masukkan perbaikannya, Yang Mulia.

233. KETUA: ASWANTO

Untuk Panel 2, ya?

234. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TANDA PERDAMAIAN NASUTION

Panel 2 dan seluruh panelnya juga, Yang Mulia.

235. KETUA: ASWANTO

Oke, baik. Dicatat, ya. Jadi, memang aslinya cuma satu kan?

236. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TANDA PERDAMAIAN NASUTION

Aslinya cuma satu, Yang Mulia.

237. KETUA: ASWANTO

Ya, glondongan itu.

Baik. Kemudian untuk pengesahan bukti Perkara Nomor 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ini ada bukti tambahan dari Pemohon untuk DPRD Kota Metro IV, Provinsi Lampung bukti tambahan P-2, P-3, P-3a, P-8, P-14, P-a sampai dengan P-d, kemudian P-3c, P-3d, P-5a, P-7a dan P-7b betul, ya? PKS tambahan.

238. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AMPRIA BUKHORI

Betul, Yang Mulia.

239. KETUA: ASWANTO

Betul, ya?

240. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AMPRIA BUKHORI

Betul, Yang Mulia. Tapi ada alat bukti perbaikan yang kemarin tidak disahkan, Majelis.

241. KETUA: ASWANTO

Yang mana itu?

242. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AMPRIA BUKHORI

P-2, P-3 sampai dengan P-8.

243. KETUA: ASWANTO

Oke. Ini kita sahkan.

244. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AMPRIA BUKHORI

Eh P-14 ... P-14.

245. KETUA: ASWANTO

Kita sahkan sekarang, ya?

KETUK PALU 1X

246. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AMPRIA BUKHORI

Permisi, Yang Mulia, 1 lagi. Untuk Legal Standing juga kemarin belum di sahkan.

247. KETUA: ASWANTO

Legal Standing?

248. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AMPRIA BUKHORI

Ya. Yang (...)

249. KETUA: ASWANTO

Buktinya?

250. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AMPRIA BUKHORI

Ya.

251. KETUA: ASWANTO

P berapa itu?

252. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AMPRIA BUKHORI

P-A sama P-D

253. KETUA: ASWANTO

Ini kan ada P-A sampai dengan P-D. Ini tambahan ini, sudah kita sahkan tadi.

254. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AMPRIA BUKHORI

Ya, terima kasih.

255. KETUA: ASWANTO

Kemudian untuk Termohon Perkara Nomor 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Dapil Kota Metro IV ... Dapil Kota Metro VI Lampung bukti T-001-KotaMetro4-PKS-06-08-09 sampai dengan T-014-KotaMetro4-PKS-06-08-09. Betul, ya? Termohon, ya?

256. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN NOMOR 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA

Betul.

KETUA: ASWANTO

KETUK PALU 1X

Kemudian untuk Perkara Nomor 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Termohon untuk DPR RI Lampung II, kemudian Kota Bandar Lampung II, dan Kota Tanggamus I. Bukti yang dimasukkan T-001-Lampung2-Gerindra-0 ... eh sori ... Gerindra-149-02-90 sampai dengan T-002-Lampung2-Gerindra-149-02-09, T-001-KotaBandarLampung2-Gerindra-149-02-09 sampai dengan 00 ... T-007-KotaBandarLampung2-Gerindra-149-02-09, kemudian T-001-Tanggamus1-Gerindra-149-02-09 sampai dengan T-004-Tanggamus1-Gerindra-149-02-09. Betul, ya?

257. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN NOMOR 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA

Betul. Terus yang ... (...)

258. KETUA: ASWANTO

Ada (...)

259. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN NOMOR 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA

Yang Mulia 1, tadi Yang Mulia Pak Manahan tadi yang kita pakai itu yang tanggal 12, Pak, perbaiki jawaban. Ya. Yang 12.

260. KETUA: ASWANTO

Baik.

261. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN NOMOR 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA

Terima kasih.

262. KETUA: ASWANTO

Kemudian ada catatan untuk Perkara Nomor 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 bagi Termohon T-007-KotaBandarLampung2-Gerindra-149-02-09 itu tidak ... kita belum menerima bukti fisiknya, ya? Kita sahkan kecuali yang belum kita terima bukti fisiknya.

KETUK PALU 1X

Kemudian untuk Perkara Nomor 48-14-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Termohon Dapil Tanggamus IV, Dapil VIII Lampung Timur, bukti yang diajukan adalah T-001-Lampung8-Demokrat-48-14-09 sampai dengan T-009-Lampung8-Demokrat-48-14-09. Kemudian T-001-Tanggamus4-Demokrat-48-14-09 sampai dengan T-004-Tanggamus4-Demokrat-48-14-09. Betul, ya? untuk Perkara Nomor 48-14-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

263. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 48-14-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAUFIK HIDAYAT

Betul, Yang Mulia.

264. KETUA: ASWANTO

KETUK PALU 1X

Kemudian untuk Pihak Terkait Perkara ... Pihak Terkait untuk Perkara ... ini PDIP ... untuk Perkara Nomor 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Pihak Terkait PDI-P Tanggamus I, ya? PT-1 sampai dengan PT-40.

265. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TANDA PERDAMAIAN NASUTION

Benar, Yang Mulia.

266. KETUA: ASWANTO

Ya.

KETUK PALU 1X

Kemudian alat bukti Bawaslu untuk Perkara Nomor 08 ... 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, dan 48-14-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 bukti yang dimasukkan adalah PK.8.15-01 sampai dengan PK.8.14-75, tapi ini masih ada beberapa catatan nanti ... ada beberapa yang belum ada bukti fisiknya, nanti berhubungan dengan pihak Kepaniteraan, ya? Kita sahkan yang sudah lengkap.

KETUK PALU 1X

Penyampaian tentang penundaan sidang, sidang kita ditunda sampai hari yang ditentukan oleh Mahkamah. Penentuan harinya akan disampaikan kemudian melalui panggilan tertulis, ya? Agenda untuk sidang berikutnya mendengarkan keterangan saksi, ahli, Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu serta pengesahan alat bukti tambahan.

Kemudian ada beberapa catatan. Pertama, soal jumlah saksi dan ahli, nanti akan disampaikan pada panggilan sidang, ya, disampaikan dalam surat panggilan sidang. Dan untuk saksi maupun ahli diminta

untuk identitas lebih awal dimasukkan. Untuk saksi, paling tidak disampaikan apa-apa yang atau pokok-pokok yang akan dipersaksikan, ya, pokok-pokok yang akan dipersaksikan di depan persidangan.

Dan untuk ahli, selain identitas atau CV tadi, keterangan tertulis juga sudah harus masuk. Saksi maupun ahli, dokumen-dokumen yang kita minta tadi itu sudah harus diajukan paling lambat itu 1 hari kerja sebelum sidang pembuktian dilaksanakan pada pukul 12.00 WIB, ya. Jelas, ya? Jadi, jumlah saksinya, Bapak, nanti, ya, saksinya Terkait juga saksinya Pihak Termohon. Jelas? Baik, dengan demikian sidang (...)

267. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN NOMOR 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA

Mohon maaf, Yang Majelis, Termohon.

268. KETUA: ASWANTO

Ya.

269. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN NOMOR 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA

Sedikit, ada renvoi di dalam jawaban kami tertanggal 12 (...)

270. KETUA: ASWANTO

Ya.

271. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN NOMOR 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA

Untuk PKS, Nomor Perkara 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Di tabel itu tertulis, Nomor 1 PKS.

272. KETUA: ASWANTO

Halaman berapa?

273. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN NOMOR 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA

Halaman 18.

274. KETUA: ASWANTO

Halaman 18, ya.

275. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN NOMOR 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA

Nomor 2, tertulis juga PKS. Harusnya PKB.

276. KETUA: ASWANTO

Oh, ya.

277. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN NOMOR 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA

Harusnya PKB, itu satu.

278. KETUA: ASWANTO

Baik.

279. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN NOMOR 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA

Terus, jawaban untuk Perkara 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, jawaban kami berpegang kepada ... tertanggal 12 Juli.

280. KETUA: ASWANTO

Ya, oke.

281. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN NOMOR 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA

Terima kasih, Yang Mulia.

282. KETUA: ASWANTO

Ada tambahan, Yang Mulia? Baik, dengan demikian sidang selesai dan kita tutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.39 WIB

Jakarta, 16 Juli 2019
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.